

ABSTRAK

ASAS KEADILAN ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI KASUS KEDUDUKAN DAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN YANG MENJADI BAGIAN DARI BOEDEL PAILIT)

Azly Rizaldy Daulay (2210622103), Aurora Jillena Meliala, Iwan Erar Joesoef

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan eksekusi jaminan oleh kreditor separatis terhadap debitor yang dinyatakan pailit serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan hak kreditor separatis dalam kepailitan, yang berpotensi mereduksi hak istimewa yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun dalam praktik, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh masa penangguhan (*stay*), intervensi kurator, serta pembebanan biaya yang tidak selalu proporsional, sehingga berpotensi mengurangi nilai ekonomis jaminan dan hak yang seharusnya diterima oleh kreditor separatis. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat pengaturan yang memadai mengenai perlindungan terhadap nilai jaminan selama masa penangguhan, yang dalam praktik internasional dikenal sebagai konsep *adequate protection*. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan kolektif dalam kepailitan dan perlindungan hak kebendaan kreditor separatis. Adapun konstruksi hukum yang ideal dalam penerapan eksekusi jaminan kreditor separatis harus mencerminkan keseimbangan antara prinsip sita umum dan perlindungan hak kebendaan, melalui penerapan masa penangguhan yang proporsional, pembatasan kewenangan kurator, pengaturan pembebanan biaya yang jelas, serta distribusi hasil penjualan yang sesuai dengan prinsip hak preferen. Selain itu, diperlukan pengadopsian konsep *adequate protection* dalam hukum kepailitan Indonesia guna menjamin perlindungan terhadap nilai jaminan selama proses kepailitan berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor separatis tanpa mengabaikan kepentingan kreditor lainnya.

Kata Kunci: Kreditor Separatis, Kepailitan, Eksekusi Jaminan, Hak Kebendaan, Keadilan

ABSTRACT

THE PRINCIPLE OF FAIRNESS IN THE EXECUTION OF COLLATERAL HELD BY SEPARATIST CREDITORS IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS (A CASE STUDY ON THE STATUS AND EXECUTION OF COLLATERAL THAT BECOMES PART OF THE BANKRUPTCY ESTATE)

Azly Rizaldy Daulay (2210622103), Aurora Jillena Meliala, Iwan Erar Joesoef

This study aims to analyze the implementation of collateral execution by secured creditors (separatist) against debtors declared bankrupt and to formulate an ideal legal construction to ensure legal certainty and justice. The background of this research is the inconsistency between normative regulations and the practical implementation of secured creditors' rights in bankruptcy, which can reduce their preferential rights. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The results show that normatively, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU grants secured creditors the right to execute their collateral as if no bankruptcy had occurred. However, in practice, the exercise of such rights is limited by the stay period, the curator's intervention, and the imposition of costs that are not always proportional, thereby potentially reducing the economic value of the collateral and the rights that secured creditors should obtain. This study also finds that there is no adequate regulation to protect collateral value during the stay period, a concept known in international practice as adequate protection. The absence of such regulation leads to an imbalance between the collective interests in bankruptcy proceedings and the protection of secured creditors' proprietary rights. The ideal legal construction for the implementation of collateral execution by secured creditors should reflect a balance between the principle of general confiscation and the protection of proprietary rights, through a proportional application of the stay period, limitation of the curator's authority, clear regulation on cost allocation, and distribution of proceeds in accordance with the principle of preferential rights. Furthermore, it is necessary to adopt the concept of adequate protection in Indonesian bankruptcy law to preserve the value of collateral during bankruptcy proceedings. Therefore, this study is expected to contribute to the development of bankruptcy law in Indonesia, particularly in strengthening legal protection for secured creditors without disregarding the interests of other creditors.

Keywords: Secured Creditors, Bankruptcy, Collateral Execution, Proprietary Rights, Justice